

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang dalam pembangunan nasionalnya pada hakikatnya mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dilihat dari perkembangan zaman, pertumbuhannya, serta pembangunan ekonominya sangat berperan penting untuk meningkatkan pendapatan ekonomi daerah dan mensejahterakan rakyat. (Halim, 2020)

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah aktivitas yang memiliki kemampuan untuk memperlebar peluang kerja dan memberikan pelayanan dalam bidang ekonomi kepada masyarakat sehingga dapat berguna dalam penyelenggaraan pemerataan dan penguatan pandangan masyarakat, serta dapat menumbuhkan ekonomi untuk merealisasikan stabilitas nasional. (Aliffiana & Widowati, 2018)

Pentingnya peranan industri kecil dalam mengembangkan perekonomian nasional ditunjukkan dengan ditetapkannya Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam Undang-Undang ini diatur bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan yang seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan

peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Disamping itu, kegiatan yang dilakukan oleh UMKM adalah salah satunya agar produk kreatif daerah dapat dikenal dan memberikan peluang bisnis bagi pelaku usaha di daerah tersebut. UMKM berkontribusi penting dalam meningkatkan pendapatan perkapita dan perekonomian di daerah, sehingga pelaku UMKM diharuskan bisa berkontribusi dalam pengembangan perekonomian di negaranya. (Halim, 2020)

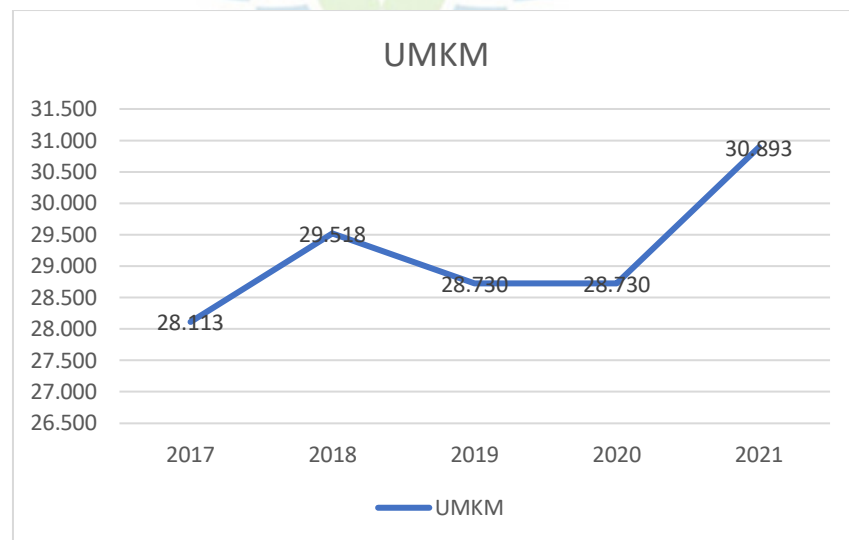
Menurut Nalini (2021) berpendapat bahwa Pemerintah daerah juga dapat memberikan dorongan terhadap masyarakat dalam berwirausaha. Salah satunya dalam wujud sektor UMKM. Sektor UMKM adalah sebuah kegiatan wirausaha ekonomi yang dapat dimiliki satu orang maupun kelompok dengan ketentuan perundang-undangan. (Salam & Prathama, 2022)

Adanya sektor UMKM dapat menciptakan beragam manfaat bagi daerahnya seperti menghadirkan wirausaha baru sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, terlebih lagi akan menyerap tenaga kerja. (Karimah et al., 2021)

Di Kabupaten Majalengka mempunyai beberapa tempat wisata yang dapat dikunjungi seperti panyaweyan, paralayang, curug cipeuteuy, dan lain-lain. Keberadaan UMKM berkaitan erat dengan objek-objek wisata di daerah, dengan dikembangkannya pariwisata berdampak pada UMKM yaitu memberikan pelayanan bagi pengunjung dengan menawarkan berbagai macam produk UMKM.

Pemerintah Kabupaten Majalengka berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan berbagai kesempatan berusaha di bidang UMKM. Namun usaha tersebut terkendala dari pihak UMKM itu sendiri yaitu masalah modal, kemampuan produksi, dan sumber daya.

Dikutip dari artikel “Ini strategi diskominfo dan K2UKM Majalengka untuk pemulihan ekonomi UMKM”, Kepala Dinas K2UKM Kabupaten Majalengka, Sadili mengatakan bahwa UMKM di Kabupaten Majalengka sangat terdampak, terutama sejak diberlakukan PSBB pada 9 Maret. PSBB membatasi sekolah, kantor-kantor melakukan WFH, pembatasan kegiatan keagamaan, seni budaya dan pembatasan penggunaan moda transportasi. (Abduh, 2020), terlihat dalam data berikut ini :



Gambar 1.1 Data UMKM Kabupaten Majalengka 2017-2021

Sumber : K2UKM Kabupaten Majalengka, 2017-2021

Dari data diatas terlihat bahwa pada tahun 2018 jumlah UMKM meningkat tetapi pada tahun 2019 akhir jumlahnya menurun karena adanya

pandemi covid 19 sampai awal tahun 2021. Dampak tersebut sangat dirasakan pelaku UMKM dan juga dihadapi masalah yang kompleks yaitu penurunan penjualan, pemasaran, permodalan, kegiatan produksi, sumberdaya yang rendah, kesulitan bahan baku. (Charismanur et al., 2021)

Dari permasalahan diatas, Dinas K2UKM Kabupaten Majalengka dan dinas-dinas terkait perlu melakukan pengembangan terhadap pelaku UMKM. Ada beberapa program pengembangan pelaku UMKM diantaranya pengarahan, bimbingan, bantuan modal, perluasan jejaring pemasaran, peningkatan program kemitraan serta mengevaluasi terhadap hasil program tersebut.

Menurut Asy'arie, (2001) berpendapat bahwa terbatasnya modal serta kemampuan menguasai teknologi bagi UMKM kesulitan dalam menaikkan nilai tambah usaha, akibatnya penghasilan mereka juga rendah. Demikian juga kualitas kerja UMKM yang buruk berpengaruh terhadap lingkungan kerja serta kurang berdaya saing produk yang dihasilkan. Selain itu, kendala yang dihadapi oleh UMKM yaitu terbatasnya akses pemasaran berpengaruh dalam mengembangkan kapasitas produksi dan usahanya. (Tajuddin et al., 2021)

Dari permasalahan tersebut diatas perlu ada kebijakan pemerintah bagi UMKM terhadap keberlangsungan UMKM, sama halnya dengan ungkapkan George. J. Stigler dalam Mandala Harefa (2008 ; 206), menyatakan :

“regulasi merupakan sebuah aturan yang dikehendaki dapat memberi perlindungan serta manfaat bagi masyarakat mapupun sekelompok masyarakat. (Purnomo, 2014)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Sedangkan, mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomer 22 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.

Pengembangan UMKM memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Pembinaan dirasa penting sama halnya diungkapkan oleh Abdul Halim (2020) bahwa peranan UMKM sangat penting untuk kemajuan suatu daerah, terkhusus untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Keterkaitannya dengan kebijakan publik, dalam prosesnya implementasi yaitu suatu hal penting karena suatu kebijakan harus di implementasi untuk mengetahui pengaruh dari tujuan yang diinginkan. Ripley dan Franklin dalam (Winarno, 2014:148) menjelaskan bahwa implelementasi adalah segala sesuatu yang terjadi setelah ditetapkannya kebijakan yang memberikan sesuatu fakta baru. Implementasi meliputi tindakan-tindakan tanpa tindakan dari beragam pelaksana. Terutama pelaksana kebijakan yang dimaksud dalam membuat kebijakan atau program yang berjalan. Badan pelaksana yang mendapatkan tugas dari undang-undang atau kebijakan memiliki kewajiban melaksanakan

kebijakan tersebut harus bisa memperoleh sumber-sumber yang diperlukan supaya pelaksanaan implementasi bisa berjalan lancar.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut di Kabupaten Majalengka berjudul : “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA DALAM MENINGKATKAN UMKM PADA DESTINASI WISATA”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, bahwa UMKM di Kabupaten Majalengka sedang mengalami penurunan seperti penurunan penjualan, pemasaran, permodalan, kegiatan produksi, sumberdaya yang rendah, kesulitan bahan baku serta perlunya bantuan dari pemerintah daerah Majalengka. Diharapkan dengan adanya bantuan dapat membangkitkan semangat para pelaku UMKM untuk semangat berusaha kembali.

Adapun rumusan masalah tersebut, adalah sebagai berikut : “Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Majalengka dalam meningkatkan UMKM pada destinasi wisata, berdasarkan : Komunikasi, Sumber Daya, Dispersi, Struktur Birokrasi.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana komunikasi dalam implementasi kebijakan untuk meningkatkan UMKM pada destinasi wisata.
2. Bagaimana sumber daya dalam implementasi kebijakan untuk meningkatkan UMKM pada destinasi wisata.

3. Bagaimana disposisi dalam implementasi kebijakan untuk meningkatkan UMKM pada destinasi wisata.
4. Bagaimana struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan untuk meningkatkan UMKM pada destinasi wisata.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti memiliki tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana komunikasi dalam implementasi kebijakan untuk meningkatkan UMKM pada destinasi wisata.
2. Untuk mengetahui sumber daya dalam implementasi kebijakan untuk meningkatkan UMKM pada destinasi wisata.
3. Untuk mengetahui dispersi dalam implementasi kebijakan untuk meningkatkan UMKM pada destinasi wisata.
4. Untuk mengetahui struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan untuk meningkatkan UMKM pada destinasi wisata.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

a. Secara teoritis

1. Bagi peneliti. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang administrasi publik, terutama dalam meningkatkan UMKM pada destinasi wisata di Kabupaten Majalengka.
2. Bagi instansi terkait. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah (K2UKM), dalam meningkatkan UMKM pada destinasi wisata di Kabupaten Majalengka.

b. Secara praktis

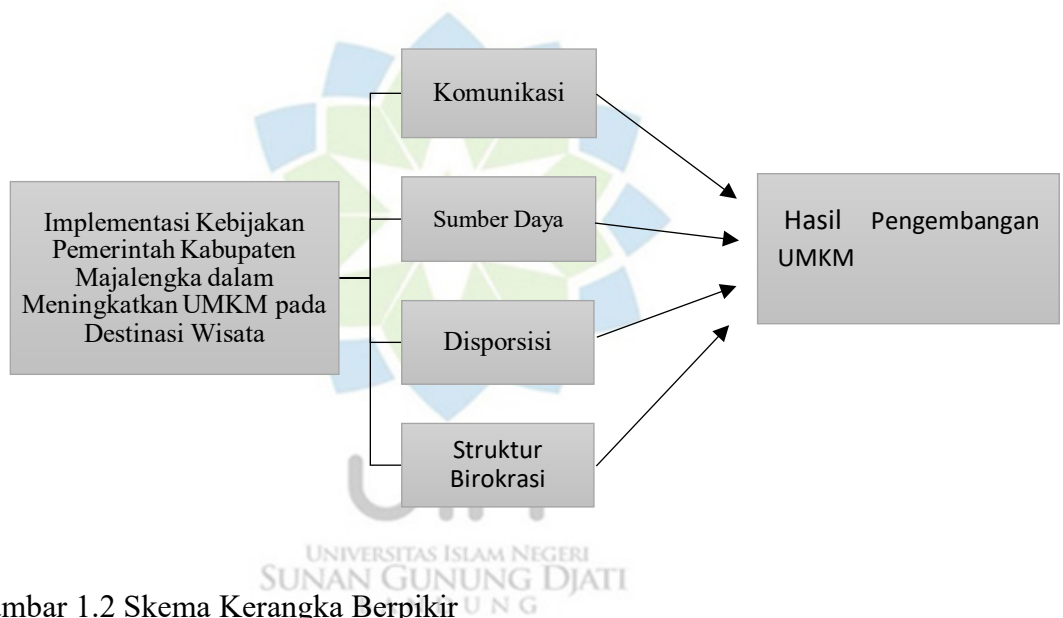
1. Bagi peneliti. Hasil penelitian ini merupakan sebuah wujud dari penerapan ilmu yang diperoleh sebagai mahasiswa Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini juga merupakan titik tolak dari teori yang telah dipelajari dengan praktik yang ada di lapangan.
2. Bagi instansi terkait. Hasil Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah terkait dalam rangka peningkatan UMKM pada destinasi wisata, dan dapat menjadi acuan bagi pengembangan industrialisasi yang sesuai dengan harapan masyarakat dan pengusaha kecil dan menengah.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan bermanfaat bagi peneliti dan instansi terkait, tetapi juga pengelola objek wisata dan masyarakat dalam meningkatkan UMKM pada destinasi wisata.

1.6 Kerangka Pemikiran

Peneliti menyusun kerangka pemikiran yaitu logika dari suatu penelitian untuk memudahkan pemahaman alur pemikiran penelitian secara sistematis. Kerangka penelitian dari peneliti ini didasari adanya permasalahan yang dialami pelaku UMKM yang mana perlu dukungan dan bantuan dari pemerintah sehingga UMKM bisa terus berjalan.

Setelah dilaksanakan implementasi kebijakan untuk meningkatkan UMKM pada Destinasi Wisata, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi solusi menyelesaikan permasalahan dalam rangka peningkatan UMKM di Destinasi wisata. Berhasil tidaknya implementasi kebijakan dalam meningkatkan UMKM pada Destinasi Wisata dipengaruhi oleh faktor Komunikasi, Sumber daya, Dispersi, dan Struktur Birokrasi. Kerangka berpikir penelitian, apabila digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.2 Skema Kerangka Berpikir

Sumber : Kerangka Berpikir (diolah peneliti), 2022